



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231– 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> email: dlh@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 050 / 20.A /SK/Sekre-2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi masing-masing;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4548 Nomor 4438);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penysunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
8. Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat nomor 6 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 6, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 195)
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

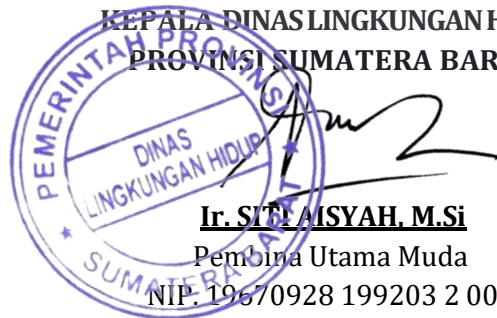
Menetapkan

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 9 Februari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT



Ir. SITI MSYAH, M.Si
Pemula Utama Muda
NIP. 19670928 199203 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang;
2. Sdr. Inspektur Prov. Sumbar di Padang;
3. Sdr. Kepala Biro Organisasi Prov. Sumbar di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 050 / 20.A /SK/Sekre-2022

TANGGAL : 9 Februari 2022

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 - 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON II DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	FORMULA	SUMBER DATA (SUB KEGIATAN)	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya penataan lingkungan hidup	Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	<i>n/a</i>	$\frac{\text{KRP dan kegiatan yang dilengkapi kajian atau kelengkapan lingkungan}}{\text{Total KRP dan kegiatan}} \times 100 \%$	1) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi 2) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 4) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya 5) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Bidang Tata Lingkungan
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase penurunan beban pencemaran	4,48	$\frac{X - Y}{Y} \times 100\%$ Ket: X : Jumlah total beban pencemaran tahun n Y : Jumlah total beban pencemaran tahun n-1	1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 3) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan dan Pentaatan Hukum Lingkungan

			$\frac{X - Y}{Y} \times 100\%$ Ket: Y : Jumlah total beban pencemaran tahun n Y : Jumlah total beban pencemaran tahun n-1	4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH 5) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi 6) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
	Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan (%)	0,07	<i>Persentase pemulihan kerusakan = $(\frac{x}{A}) \times 100$</i> Keterangan: x = Luas pemulihan LAT tahun N A = Luas Keseluruhan LAT sesuai database	1) Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan dan Pentaatan Hukum Lingkungan
Terwujudnya optimalisasi pengolahan sampah dan limbah B3	Persentase penanganan sampah	50	$= \frac{\text{Jumlah sampah RT dan SSSRT yang dapat ditangani}}{\text{jumlah timbulan sampah RT dan SSRT}} \times 100\%$	1) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 2) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lem baga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional 4) Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

	Persentase pengurangan sampah	17	$= \frac{\text{Jumlah sampah RT dan SSRT yang dapat dikurangi}}{\text{jumlah timbulan sampah RT dan SSRT}} \times 100\%$	1) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 2) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3) Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan	Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
	Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)	250000	Jumlah limbah B3 yang dikelola	1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 050 / 20.A /SK/Sekre-2022
 TANGGAL : 9 Februari 2022
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
 TAHUN 2021 - 2026

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ESELON III DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas perencanaan lingkungan	Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang disusun menurut kaidah dan ketentuan	n/a	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai kaidah/Jumlah keseluruhan dokumen perencanaan yang disusun	Tata Lingkungan
Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen lingkungan	Jumlah dokumen lingkungan yang mendapat persetujuan lingkungan	n/a	Diukur dari jumlah dokumen lingkungan yang telah mendapatkan persetujuan lingkungan	Tata Lingkungan
Meningkatnya pemeliharaan lingkungan	Persentase jumlah lokasi /kawasan yang dilakukan upaya pemeliharaan lingkungan sesuai ketentuan	n/a	Jumlah lokasi/kawasan yang dilakukan upaya pemeliharaan lingkungan sesuai ketentuan / jumlah keseluruhan kawasan yang lingkungannya wajib dipelihara sesuai ketentuan	Tata Lingkungan
Meningkatnya pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3	Persentase timbulan Limbah B3 dan Non B3 dikelola lanjut sesuai ketentuan	n/a	(Jumlah timbulan limbah B3 dan non B3 yang dikelola lanjut sesuai ketentuan / Jumlah keseluruhan timbulan LB3 dan non B3) X 100%	PSLB3PK
Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang berpartisipasi aktif	100	Dihitung berdasarkan jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang berpartisipasi secara aktif dalam upaya-upaya pengelolaan lingkungan	PSLB3PK

Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah	Persentase Kabupaten/kota yang mencapai target Jakstrada Pengelolaan Sampah	n/a	(Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target pengurangan dan penanganan sampah pada tahun n) / 19 X 100%	PSLB3PK
Meningkatnya pengawasan	Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi sesuai NSPK	30	Rata-rata persentase ketaatan pada keseluruhan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi sesuai NSPK	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Terkendalnya dampak lingkungan	Persentase media yang dilakukan upaya pengendalian	n/a	(jumlah media lingkungan yang dilakukan upaya-upaya pengendalian / jumlah keseluruhan media) X 100%	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Meningkatnya penerapan supremasi hukum	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang diberikan sanksi/ direkomendasikan sanksi	n/a	(jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diberikan/ direkomendasikan sanksi / jumlah usaha dan/atau kegiatan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas perencanaan organisasi	Nilai Komponen Perencanaan pada evaluasi SAKIP	26,18	Diukur berdasarkan rata-rata nilai komponen perencanaan Kinerja OPD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	Sekretariat
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Organisasi	Nilai Komponen Pelaporan pada Evaluasi SAKIP	12,22	Diukur berdasarkan rata-rata nilai komponen pelaporan Kinerja OPD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	Sekretariat
Meningkatnya pengawasan internal organisasi	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada Evaluasi SAKIP	6,35	Diukur berdasarkan rata-rata nilai komponen evaluasi internal OPD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	Sekretariat

Penempatan Pegawai sesuai dengan Peta Jabatan	Persentase pegawai yang penempatannya sesuai dengan peta jabatan atau persentase keterisian peta jabatan	n/a	(Jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai peta jabatannya/ jumlah seluruh pegawai DLH) x 100%	Sekretariat
Meningkatnya pelayanan umum dan kepegawaian	Persentase layanan adm kepegawaian sesuai SOP	n/a	(Jumlah layanan administrasi kepegawaian sesuai SOP/Jumlah layanan administrasi kepegawaian) X 100%	Sekretariat
	Persentase layanan surat menyurat sesuai SOP	n/a	(Jumlah layanan surat menyurat sesuai SOP/Jumlah layanan surat menyurat) X 100%	Sekretariat
	Persentase Layanan Sarpras sesuai SOP	n/a	(Jumlah layanan sarpras sesuai SOP/Jumlah layanan sarpras) X 100%	Sekretariat
Meningkatnya pengelolaan BMD	Persentase BMD dalam kondisi baik	n/a	(Jumlah BMD dalam kondisi baik/Jumlah BMD keseluruhan) X 100%	Sekretariat
	Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras pendukung kinerja	n/a	(Jumlah sarpras pendukung kinerja yang dipenuhi/Jumlah sarpras yang dibutuhkan) X 100%	Sekretariat
Meningkatnya Kapasitas SDM Organisasi	Jumlah SDM yang mengikuti pengembangan kompetensi	n/a	Diukur dari jumlah ASN di OPD yang sudah mengikuti bimtek	Sekretariat
Meningkatnya Pengelolaan TPA Sampah Regional	Persentase pemenuhan pengoperasian TPA Sampah Regional sesuai dengan Permen PU No. 03 tahun 2013	n/a	(Jumlah item pemenuhan terhadap Permen PU 03/2013 pada operasional TPA Sampah Regional / jumlah keseluruhan item yang harus dipenuhi pada permen PU 03/2013) X 100%	UPTD Persampahan
	Tingkat kepuasan pelanggan	n/a	(Jumlah stakeholders selaku responden yang menyatakan puas terhadap layanan TPA Sampah Regional / jumlah keseluruhan stakeholders selaku responden) X 100%	UPTD Persampahan
	Persentase KJP yang dibayarkan kabupaten/kota	90	(Jumlah KJP yang dibayarkan oleh kabupaten/kota pada tahun n / Jumlah total tagihan KJP pada tahun n) X 100%	UPTD Persampahan

Meningkatnya pengelolaan laboratorium lingkungan	Persentase terpenuhinya SNI 17025	n/a	(jumlah item pemenuhan SNI 17025 yang dapat terpenuhi pada tahun n / jumlah keseluruhan item yang wajib dipenuhi sesuai SNI 17025) X 100%	UPTD Laboratorium Lingkungan
	Indeks kepuasan pelanggan	n/a	(Jumlah stakeholders selaku responden yang menyatakan puas terhadap layanan laboratorium lingkungan / jumlah keseluruhan stakeholders selaku responden) X 100%	UPTD Laboratorium Lingkungan

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 050 / 20.A /SK/Sekre-2022
 TANGGAL : 9 Februari 2022
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
 TAHUN 2021 - 2026

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ESELON IV/FUNGSIONAL PENYETARAAN DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB
Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun tepat waktu	n/a	Diukur dari dokumen perangkat daerah tersebut yang disampaikan tepat waktu ke OPD Penanggung Jawab	Sub Koordinator Program
Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan perangkat daerah	n/a	$x = \frac{a + b + c + d}{4}$ $a = \frac{\sum \text{sasaran dan Indikator Kinerja pada PK}}{\sum \text{sasaran dan Indikator Kinerja pada Renstra}} \times 100\%$ $b = \frac{\sum \text{sasaran dan Indikator Kinerja pada RKT}}{\sum \text{sasaran dan Indikator Kinerja pada Renstra}} \times 100\%$ $c = \frac{\sum \text{sasaran, Indikator Kinerja dan target tahunan pada Rencana Aksi}}{\sum \text{sasaran, Indikator Kinerja dan target pada PK}} \times 100\%$ $d = \frac{\sum \text{Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja}}{\sum \text{Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renstra}} \times 100\%$ $x = \text{Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan perangkat daerah}$	Sub Koordinator Program
Meningkatnya implementasi dokumen perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perangkat daerah dengan dokumen penganggaran	n/a	<u>(Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan dalam DPA / Jumlah sub kegiatan yang diusulkan dalam dokumen Renja) X 100%</u>	Sub Koordinator Program

Tersusunnya Dokumen Pelaporan Organisasi Tepat Waktu	Jumlah dokumen pelaporan organisasi yg disusun tepat waktu	n/a	Diukur dari dokumen pelaporan perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	Sub Koordinator Program
Meningkatnya Kesesuaian Laporan dengan Pedoman Penyusunan Laporan	Persentase Dokumen Pelaporan yg sesuai dg pedoman penyusunan Laporan	n/a	Diukur berdasarkan hasil evaluasi dari OPD yang meminta laporan tersebut. Dengan rumusan sebagai berikut: (Jumlah laporan yang hasil evaluasi/verifikasinya sesuai / Jumlah semua laporan) X 100%	Sub Koordinator Program
Meningkatnya Pemanfaatan laporan terhadap perencanaan perangkat Daerah	Persentase Hasil evaluasi yg ditindaklanjuti dlm dokumen perangkat Daerah	n/a	(Jumlah rekomendasi hasil evaluasi SAKIP terkait komponen pelaporan yang ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi hasil evaluasi SAKIP terkait komponen pelaporan) X 100%	Sub Koordinator Program
Meningkatnya tindak lanjut temuan pemeriksaan	Persentase temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	n/a	(Jumlah temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti / jumlah temuan pemeriksaan) X 100%	Sub Koordinator Program
Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan	Persentase pengurangan kesalahan hasil verifikasi keuangan	n/a	((Jumlah kesalahan hasil verifikasi keuangan tahun n - Jumlah kesalahan hasil verifikasi keuangan tahun (n-1)): Jumlah kesalahan hasil verifikasi keuangan tahun (n-1)) X 100%	Kasubag TU dan Kepegawaian
Meningkatnya ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN tepat waktu	Jumlah ASN yang mengisi LHKPN/ LHKASN tepat waktu	n/a	Jumlah ASN yang mengisi LHKPN/ LHKASN tepat waktu	Kasubag TU dan Kepegawaian
Ketersediaan data kepegawaian yang akurat	Persentase ketersediaan data kepegawaian	n/a	(Jumlah pegawai yang data kepegawaiannya lengkap / Jumlah pegawai) X 100%	Kasubag TU dan Kepegawaian
Tersusunnya Uraian Tugas ASN sesuai regulasi	Jumlah dokumen uraian tugas yang sesuai regulasi	n/a	Diukur berdasarkan jumlah dokumen uraian tugas yang sudah disusun sesuai regulasi	Kasubag TU dan Kepegawaian
Ketersediaan Dokumen Analisa Jabatan dan Peta Jabatan yg sesuai dg regulasi	Dokumen anjab yang sesuai dengan regulasi	n/a	Diukur berdasarkan jumlah dokumen anjab yang sudah disusun sesuai regulasi	Kasubag TU dan Kepegawaian
	Dokumen peta jabatan yg sesuai dengan regulasi	n/a	Diukur berdasarkan jumlah dokumen peta jabatan yang sudah disusun sesuai regulasi	Kasubag TU dan Kepegawaian
Tersusunnya Dokumen SOP	Jumlah dokumen SOP yg sesuai	n/a	Diukur berdasarkan jumlah dokumen SOP yang sudah	Kasubag TU dan

sesuai regulasi	regulasi		disusun sesuai regulasi	Kepegawaian
Meningkatnya Kapasitas SDM pemberi Layanan	Jumlah SDM layanan yang kompeten	n/a	Diukur berdasarkan Jumlah ASN layanan yg mengikuti Diklat/Sosialisasi/Bimtek	Kasubag TU dan Kepegawaian
Meningkatnya BMD yang diadakan dan dipelihara	Jumlah Aset yang diadakan	n/a	Diukur dari jumlah aset yang diadakan tahun n	Kasubag TU dan Kepegawaian
	Persentase aset yang tidak bermanfaat yang sudah dihapuskan	n/a	(Jumlah aset yang telah dihapuskan / Jumlah aset yg seharusnya dihapuskan) X 100%	Kasubag TU dan Kepegawaian
Meningkatnya Pengamanan BMD sesuai regulasi	Persentase aset yg diinventaris	n/a	(Jumlah Aset yang sudah diinventarisir / jumlah aset keseluruhan) X 100%	Kasubag TU dan Kepegawaian
	Persentase data aset yang sudah di-rekon	n/a	(Nilai aset yang tercatat pada OPD / Nilai Aset OPD yg tercatat pada berita acara rekonsiliasi aset) x 100%)	Kasubag TU dan Kepegawaian
	Persentase aset yg sudah diasuransikan	n/a	(Jumlah Aset yang berasuransi / jumlah aset yang harus diasuransikan) X 100%	Kasubag TU dan Kepegawaian
Tersusunnya data kebutuhan pengembangan kapasitas SDM	Dokumen data riwayat pengembangan kapasitas SDM yg tersusun	n/a	Diukur dari jumlah dokumen berisikan data kebutuhan pengembangan kapasitas SDM yang tersusun	Kasubag TU dan Kepegawaian
Tersusunnya Rencana Kebutuhan pengembangan Kapasitas SDM	Dokumen rencana kebutuhan pengembangan kapasitas SDM yg tersusun	n/a	Diukur dari jumlah dokumen rencana kebutuhan pengembangan kapasitas SDM yang tersusun	Kasubag TU dan Kepegawaian
Terwujudnya proses penilaian dokumen lingkungan hidup yang sesuai dengan SOP	Persentase Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang memproses dokumen lingkungan sesuai SOP	n/a	(jumlah insyansi lingkungan hidup kab/kota yang memproses dokumen lingkungan sesuai SOP) / 19 X 100%	Sub Koordinator Kajian Dampak Lingkungan
	Persentase pemenuhan SOP penilaian/ pemeriksaan dokumen lingkungan	n/a	(Jumlah SOP penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan yang diopenuhi / jumlah keseluruhan SOP yang harus dipenuhi X 100%)	Sub Koordinator Kajian Dampak Lingkungan
Meningkatnya kesesuaian substansi dokumen lingkungan dengan NSPK	Persentase dokumen lingkungan yang substansi sesuai dengan NSPK	n/a	Jumlah dokumen lingkungan yang substansinya sesuai dengan NSPK / jumlah keseluruhan dokumen lingkungan yang diterima untuk dibahas	Sub Koordinator Kajian Dampak Lingkungan
Tersedianya dokumen	Jumlah dokumen perencanaan LH yang	n/a	Diukur berdasarkan jumlah dokumen perencanaan LH yang	Sub Koordinator

perencanaan yang mencukupi	wajib disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan LH		disusun selama tahun n	Kebijakan Wilayah dan Sektor
Baiknya sinergitas dengan dokumen perencanaan yang lain	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan yang disinergikan dengan dokumen perencanaan lainnya	n/a	Diukur berdasarkan jumlah dokumen perencanaan lingkungan yang disinergikan dengan dokumen perencanaan lainnya	Sub Koordinator Kebijakan Wilayah dan Sektor
Meningkatnya upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Jumlah lokasi yang dilakukan upaya Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	n/a	Diukur berdasarkan jumlah lokasi yang dilakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tahun n	Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan
Terwujudnya Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH)	Jumlah kawasan yang dilakukan konservasi	n/a	Diukur berdasarkan jumlah kawasan yang dilakukan konservasi pada tahun n	Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan
Meningkatnya kecukupan fasilitas pengelolaan LB3	Persentase kecukupan sarana/prasarana	n/a	(Jumlah sarpras yang tersedia / jumlah sarpras yang harus tersedia) X 100%	Sub Koordinator Pengelolaan Limbah B3
	Jumlah sarpras yg berizin	n/a	Dihitung dari jumlah sarpras pengelolaan LB3 yang sudah memiliki izin	Sub Koordinator Pengelolaan Limbah B3
Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM	Persentase kecukupan SDM yang bersertifikat	n/a	(Jumlah SDM bersertifikat pengelolaan LB3 / jumlah keseluruhan SDM) X 100%	Sub Koordinator Pengelolaan Limbah B3
Meningkatnya kualitas manajemen operasional	Persentase pemenuhan SOP dan persyaratan izin	n/a	(jumlah SOP dan persyaratan izin yang tersedia / Jumlah SOP dan persyaratan izin yang wajib disediakan) X 100%	Sub Koordinator Pengelolaan Limbah B3
	Annual BCR	n/a	(Jumlah pendapatan diperoleh dari operasional incinerator / Jumlah biaya operasional incinerator)	Sub Koordinator Pengelolaan Limbah B3
Meningkatnya pelayanan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional	Persentase pelayanan pertek dan SLO pengumpulan Limbah B3 sesuai SOP	n/a	(Jumlah pelayanan pertek dan SLO pengumpulan LB3 sesuai SOP tahun n/jumlah keseluruhan pelayanan pertek dan SLO pengumpulan LB3 pada tahun n) X 100%	Sub Koordinator Pengelolaan Limbah B3

pengumpulan limbah B3 skala provinsi				
Baiknya ketersediaan pilot project / percontohan yang berkelanjutan	Jumlah percontohan atau pilot project percontohan yang dapat dijadikan rujukan	n/a	Diukur berdasarkan jumlah percontohan/pilot project yang dinilai berhasil dan dapat dijadikan rujukan dalam tahun n	Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya penyelenggaraan iven-iven stimulant	Jumlah iven lingkungan berkaitan dengan program 3R yang diselenggarakan secara berkala	n/a	Diukur berdasarkan jumlah iven lingkungan yang bersifat kampanye program 3R sampah yang diselenggarakan dalam tahun n	Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya fasilitasi pengakuan dan penguatan kelompok masyarakat terkait Perlindungan dan Pengelolaan LH	Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi pengakuan dan/atau penguatannya	n/a	Diukur berdasarkan jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi pengakuan dan/atau penguatannya dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam tahun n	Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya ketersediaan mekanisme pengelolaan sampah	Jumlah regulasi yang diterbitkan atau rencana teknis yang disusun	n/a	Diukur berdasarkan jumlah regulasi/SOP/edaran/peraturan perundang-undangan yang disusun	Sub Koordinator Pengelolaan Sampah
	Persentase Kab./Kota yang menerbitkan regulasi terkait pengelolaan sampah	n/a	(jumlah kab./kota yang menerbitkan regulasi/aturan terkait pengelolaan sampah / 19) X 100%	Sub Koordinator Pengelolaan Sampah
Terwujudnya implementasi 3R dalam pengelolaan sampah	Jumlah kegiatan / kelompok masyarakat yang mengaplikasikan 3R sampah	n/a	Diukur berdasarkan jumlah kegiatan/kelompok masyarakat yang mengaplikasikan 3R sampah	Sub Koordinator Pengelolaan Sampah
Terwujudnya implementasi pemrosesan akhir sampah di TPA sesuai kriteria	Persentase TPA/TPA regional yang dioperasikan sesuai ketentuan	n/a	(jumlah TPA/TPA regional yang dioperasikan sesuai SOP / jumlah keseluruhan TPA/TPA regional di Sumbar) X 100%	Sub Koordinator Pengelolaan Sampah
Meningkatnya cakupan pemantauan sumber dan media	Persentase media lingkungan yang dipantau	n/a	(Jumlah media lingkungan yang dipantau tingkat pencemarannya / jumlah keseluruhan media lingkungan) X	Sub Koordinator Pencemaran

			100%	Lingkungan
	Persentase sumber yang dipantau	n/a	(Jumlah sumber pencemar lingkungan yang dipantau / jumlah keseluruhan sumber pencemar yang seharusnya dipantau) X 100%	Sub Koordinator Pencemaran Lingkungan
Tersedianya regulasi dan persetujuan teknis yang memadai	Jumlah aturan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang difasilitasi proses penetapannya	n/a	Diukur dari jumlah aturan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang difasilitasi proses penerbitannya	Sub Koordinator Pencemaran Lingkungan
	Jumlah persetujuan teknis yang difasilitasi proses penerbitannya	n/a	Diukur dari jumlah persetujuan teknis yang difasilitasi proses penerbitannya	Sub Koordinator Pencemaran Lingkungan
Meningkatnya cakupan pemantauan sumber dan media	Persentase sumber yang dipantau	n/a	(Jumlah sumber pencemar lingkungan yang berimplikasi kerusakan lingkungan yang dipantau / jumlah keseluruhan sumber pencemar yang berimplikasi kerusakan lingkungan yang seharusnya dipantau) X 100%	Sub Koordinator Kerusakan Lingkungan
Meningkatnya upaya pencegahan degradasi lahan	Jumlah lahan yang diidentifikasi rusak dan ditindaklanjuti dengan upaya pencegahan	n/a	Diukur dari jumlah lokasi /lahan yang diidentifikasi kerusakannya dan ditindaklanjuti dengan upaya pencegahan	Sub Koordinator Kerusakan Lingkungan
Optimalnya upaya pemulihan pada media lingkungan yang rusak/tercemar	jumlah lokasi/media lingkungan yang dipulihkan	n/a	Diukur dari jumlah lokasi/media lingkungan yang telah ada upaya pemulihannya	Sub Koordinator Kerusakan Lingkungan
Meningkatnya pemenuhan NSPK	Persentase kecukupan NSPK dari kebutuhan pengawasan/analisis sesuai ketentuan	n/a	(jumlah NSPK pengawasan/analisis yang disusum ayau tersedia / jumlah NSPK pengawasan/analisis yang wajib harus ada) X 100%	Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa, dan Penegakan Hukum Lingkungan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas PPLH	Rasio jumlah PPLHD yang dikukuhkan dengan jumlah objek yang harus diawasi	n/a	(jumlah PPLHD yang dikukuhkan / jumlah objek yang harus diawasi) X 100%	Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa, dan Penegakan

				Hukum Lingkungan
Tersedianya regulasi dan persetujuan teknis yang memadai	Jumlah aturan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang difasilitasi proses penetapannya	n/a	Diukur dari jumlah aturan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang difasilitasi proses penetapannya dalam tahun n	Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa, dan Penegakan Hukum Lingkungan
	Jumlah persetujuan teknis yang difasilitasi proses penerbitannya	n/a	Diukur dari jumlahJumlah persetujuan teknis yang difasilitasi proses penerbitannya dalam tahun n	Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa, dan Penegakan Hukum Lingkungan
Meningkatnya pembinaan hukum	Persentase implementasi izin lingkungan/Persetujuan lingkungan, IPPLH/Pertek, dan peraturan perundang-undangan LH yang sesuai dengan ketentuan	n/a	(jumlah implementasi izin lingkungan/Persetujuan lingkungan, IPPLH/Pertek, dan peraturan perundang-undangan LH yang sesuai dengan ketentuan / implementasi izin lingkungan/Persetujuan lingkungan, IPPLH/Pertek, dan peraturan perundang-undangan LH keseluruhan) X 100%	Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa, dan Penegakan Hukum Lingkungan
Terwujudnya penyelesaian kasus lingkungan hidup	Persentase kasus lingkungan hidup yang diselesaikan sesuai SOP	n/a	(jumlah kasus lingkungan hidup yang diselesaikan sesuai SOP / jumlah keseluruhan kasus lingkungan hidup yang diterima pada tahun n) X 100%	Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa, dan Penegakan Hukum Lingkungan
Kualitas dan kuantitas PPNS baik	Jumlah PPNS LH yang berkompeten	n/a	Diukur dari jumlah PPNS LH yang dilantik dan ditempatkan pada bidang yang sesuai di Dinas LH Provinsi Sumatera Barat	Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa, dan Penegakan Hukum Lingkungan

Meningkatnya kualitas perencanaan, operasional dan pelaporan	Jumlah keluhan/komplain dari kab/kota yang tertangani	n/a	Diukur dari jumlah keluhan dari kabupaten/kota pemanfaat layanan TPA regional yang ditangani	Seksi Perencanaan dan Evaluasi
	Jumlah SOP yang dievaluasi	n/a	Diukur dari jumlah SOP operasional TPA regional yang dievaluasi pada tahun n	Seksi Perencanaan dan Evaluasi
	Jumlah dokumen laporan pemantauan lingkungan kawasan TPA Regional yang disusun	n/a	Diukur dari jumlah dokumen laporan pemantauan lingkungan kawasan TPA Regional yang disusun pada tahun n	Seksi Perencanaan dan Evaluasi
	Jumlah dokumen perencanaan TPA Regional yang disusun	n/a	Diukur dari jumlah dokumen perencanaan TPA Regional yang disusun pada tahun n	Seksi Perencanaan dan Evaluasi
Ketersediaan data kepegawaian yang akurat	Persentase ketersediaan data kepegawaian	n/a	(Jumlah pegawai yang data kepegawaiannya lengkap / Jumlah pegawai) X 100%	Sub Bagian Tata Usaha
Tersusunnya Uraian Tugas ASN sesuai regulasi	Jumlah dokumen uraian tugas yang sesuai regulasi	n/a	Diukur berdasarkan jumlah dokumen uraian tugas yang sudah disusun sesuai regulasi	Sub Bagian Tata Usaha
Tersusunnya Dokumen SOP sesuai regulasi	Jumlah dokumen SOP yg sesuai regulasi	n/a	Diukur berdasarkan jumlah dokumen SOP yang sudah disusun sesuai regulasi	Sub Bagian Tata Usaha
Meningkatnya Kapasitas SDM pemberi Layanan	Jumlah SDM layanan yang kompeten	n/a	Diukur berdasarkan Jumlah ASN layanan yg mengikuti Diklat/Sosialisasi/Bimtek	Sub Bagian Tata Usaha
Meningkatnya BMD yang diadakan dan dipelihara	Jumlah Aset yang diadakan	n/a	Diukur dari jumlah aset yang diadakan tahun n	Sub Bagian Tata Usaha
	Persentase aset yang tidak bermanfaat yang sudah dihapuskan	n/a	(Jumlah aset yang telah dihapuskan / Jumlah aset yg seharusnya dihapuskan) X 100%	Sub Bagian Tata Usaha
Meningkatnya Pengamanan BMD sesuai regulasi	Persentase aset yg diinventaris	n/a	(Jumlah Aset yang sudah diinventarisir / jumlah aset keseluruhan) X 100%	Sub Bagian Tata Usaha
Tersusunnya data kebutuhan pengembangan kapasitas SDM	Dokumen data riwayat pengembangan kapasitas SDM yg tersusun	n/a	Diukur dari jumlah dokumen berisikan data kebutuhan pengembangan kapasitas SDM yang tersusun	Sub Bagian Tata Usaha

Tersusunnya Rencana Kebutuhan pengembangan Kapasitas SDM	Dokumen rencana kebutuhan pengembangan kapasitas SDM yg tersusun	n/a	Diukur dari jumlah dokumen rencana kebutuhan pengembangan kapasitas SDM yang tersusun	Sub Bagian Tata Usaha
Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM	persentase kecukupan SDM	n/a	(jumlah SDM pengelola TPA regional tersedia / jumlah SDM pengelola TPA Regional ideal yang dibutuhkan) X 100%	Sub Bagian Tata Usaha
Meningkatnya pengelolaan sarana/prasarana	Persentase kecukupan sarana/ prasarana	n/a	(jumlah sarpras yang tersedia di tahun n / jumlah sarpras yang idealnya harus ada di tahun n) X 100%	Seksi Operasional TPA Sampah Regional
	Persentase sarana/prasarana dalam kondisi baik	n/a	(jumlah sarpras dalam kondisi baik di tahun n / jumlah keseluruhan sarpras) X 100%	Seksi Operasional TPA Sampah Regional
Meningkatnya kualitas perencanaan, operasional dan pelaporan	Persentase sampah yang ditangani di TPA regional dari keseluruhan sampah yang masuk sesuai dengan SOP	n/a	(jumlah sampah masuk yang ditangani sesuai SOP / jumlah seluruh sampah masuk) X 100%	Seksi Operasional TPA Sampah Regional
	persentase KJP yang ditagih tepat waktu	n/a	(jumlah pengiriman surat tagihan KJP bulanan yang tepat pada waktunya / 12) X100%	Seksi Operasional TPA Sampah Regional
Terwujudnya Sistem Mutu Laboratorium	Jumlah formulir permintaan pengujian dan surat tagihan sampel yang dikelola	n/a	Diukur dari jumlah formulir permintaan pengujian dan surat tagihan sampel tahun n yang dikelola	Sub Bagian Tata Usaha
Baiknya kualitas dan kuantitas sumber daya laboratorium	Persentase kecukupan SDM Labor	n/a	(jumlah SDM teknis laboratorium yang tersedia di tahun n / jumlah ideal SDM teknis laboratorium yang harus ada di tahun n) X 100%	Sub Bagian Tata Usaha
	Persentase SDM Labor yang penempatannya sesuai kompetensi	n/a	(jumlah SDM teknis laboratorium yang ditempatkan sesuai kompetensi di tahun n / jumlah keseluruhan SDM teknis laboratorium di tahun n) X 100%	Sub Bagian Tata Usaha

Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan	Persentase pengurangan kesalahan hasil verifikasi keuangan	n/a	((Jumlah kesalahan hasil verifikasi keuangan tahun n - Jumlah kesalahan hasil verifikasi keuangan tahun (n-1)): Jumlah kesalahan hasil verifikasi keuangan tahun (n-1)) X 100%	Sub Bagian Tata Usaha
Meningkatnya BMD yang diadakan dan dipelihara	Jumlah Aset yang diadakan	n/a	Diukur dari jumlah aset yang diadakan tahun n	Sub Bagian Tata Usaha
	Persentase aset yang tidak bermanfaat yang sudah dihapuskan	n/a	(Jumlah aset yang telah dihapuskan / Jumlah aset yg seharusnya dihapuskan) X 100%	Sub Bagian Tata Usaha
Tersusunnya data kebutuhan pengembangan kapasitas SDM	Dokumen data riwayat pengembangan kapasitas SDM yg tersusun	n/a	Diukur dari jumlah dokumen berisikan data kebutuhan pengembangan kapasitas SDM yang tersusun	Sub Bagian Tata Usaha
Tersusunnya Rencana Kebutuhan pengembangan Kapasitas SDM	Dokumen rencana kebutuhan pengembangan kapasitas SDM yg tersusun	n/a	Diukur dari jumlah dokumen rencana kebutuhan pengembangan kapasitas SDM yang tersusun	Sub Bagian Tata Usaha
Terwujudnya Sistem Mutu Laboratorium	Persentase Capaian Sistem Mutu Laboratorium	n/a	(jumlah item pemenuhan capaian sistem mutu laboratorium yang dapat terpenuhi pada tahun n/jumlah keseluruhan item pemenuhan capaian sistem mutu laboratorium yang wajib dipenuhi pada tahun n) X 100%	Seksi Pengendalian Mutu
	Jumlah laporan hasil uji yang dikeluarkan sesuai NSPK	n/a	diukur dari jumlah laporan hasil uji yang dikeluarkan sesuai NSPK pada tahun n	Seksi Pengendalian Mutu
Baiknya kualitas dan kuantitas sumber daya laboratorium	Persentase SDM Labor yang memperoleh nilai evaluasi pelatihan baik	n/a	(jumlah SDM laboratorium yang memperoleh nilai evaluasi pelatihan baik / jumlah keseluruhan SDM laboratorium yang mengikuti evaluasi) X 100%	Seksi Pengendalian Mutu
Meningkatnya pengelolaan lingkungan laboratorium	Persentase pemenuhan UKL UPL	n/a	(jumlah item kewajiban pengelolaan lingkungan pada dokumen UKL-UPL yang dapat dipenuhi pada tahun n / jumlah keseluruhan item kewajiban pengelolaan lingkungan yang wajib dipenuhi pada dokumen UKL-UPL pada tahun n) X 100%	Seksi Pengendalian Mutu